

DAFTAR ISIAN

TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: TAWANGARGO

Kecamatan: Karangploso

Kabupaten: KAB. MALANG

Provinsi: JAWA TIMUR

Bulan: 11

Tahun: 2022

Nama Pengisi: LOLOK MERSIANTO

Pekerjaan: PERANGKAT DESA

Jabatan: SEKDES

Kepala Desa / Lurah: H SUKAR

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN

UNTUK MENGISI PROFIL

DESA/KELURAHAN

Referensi 1 :

Referensi 2:

Referensi 3:

Referensi 4:

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

| Jumlah | Jenis Kelamin | |
|----------------------------|---------------|------------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| Jumlah penduduk tahun ini | 5205 orang | 5088 orang |
| Jumlah penduduk tahun lalu | 5171 orang | 5045 orang |
| Persentase perkembangan | 0.66 % | 0.85 % |

B. Jumlah Keluarga

| Jumlah | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah Kepala Keluarga tahun ini | 3474 KK | 70 KK | 3544 KK |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 3281 KK | 62 KK | 3343 KK |
| Prosentase Perkembangan | 5.88 % | 12.9 % | |

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

| | |
|--|------------|
| 1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 6218 orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 865 orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 1274 orang |
| 4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 4032 orang |
| 5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 1321 orang |
| 6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 6 orang |
| 7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 1 orang |

B. Kesejahteraan Keluarga

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Jumlah keluarga prasejahtera | 950 keluarga |
| 2. Jumlah keluarga sejahtera 1 | 2258 keluarga |
| 3. Jumlah keluarga sejahtera 2 | 68 keluarga |
| 4. Jumlah keluarga sejahtera 3 | 10 keluarga |
| 5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 7 keluarga |
| 6. Total jumlah kepala keluarga | 3293 keluarga |

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN

| Tanaman | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
|---------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | |

B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN

| Tanaman | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
|---------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | |

C. SUBSEKTOR PETERNAKAN

| Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Jumlah Ternak (Ekor) |
|----------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | |

prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_tingkat/laporan_terkini_tingkat.php?&tahun=2022&kodesa=3507290009

1/18

D. SUBSEKTOR PERIKANAN

| Jenis Produksi | Hasil Produksi (Ton/Tahun) | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Total biaya antara yang dihabiskan (Rp) | Jenis usaha perikanan |
|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | | | |

E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN

| | |
|--|----------|
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |
| Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada | 0 jenis |

F. SUBSEKTOR KERAJINAN

| | |
|---|-------------------|
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 30.000.000,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 15.000.000,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 20.000.000,00 |
| Total jenis kerajinan rumah tangga | 0 jenis |

G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN**G.1. Subsektor Industri Pangan**

| | |
|---|-------------------|
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 60.000.000,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 30.000.000,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 3.500.000,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 3.500.000,00 |
| Total jumlah jenis industri tsb yang ada | 1 jenis |

H. SUBSEKTOR KEHUTANAN

| | |
|---|----------|
| Total nilai produksi tahun ini | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan | Rp. 0,00 |

I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN**I.1. Subsektor Perdagangan Besar**

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Total nilai transaksi | Rp. 0,00 |
| Total nilai aset perdagangan yang ada | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis perdagangan besar | Rp. 0,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |

I.2. Subsektor Perdagangan Eceran

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Jumlah total jenis perdagangan eceran | 1 jenis |
| Total nilai transaksi | Rp. 15.000.000,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan | Rp. 10.000.000,00 |
| Total nilai aset perdagangan eceran | Rp. 20.000.000,00 |

I.3. Subsektor Hotel

| | |
|---|----------|
| Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | 0 jenis |
| Jumlah total pendapatan | Rp. 0,00 |
| Jumlah total biaya pemeliharaan | Rp. 0,00 |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 0,00 |

I.4. Subsektor Restoran

| | |
|--|----------|
| Jumlah tempat penyediaan konsumsi | 0 Unit |
| Biaya konsumsi yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| Biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh | Rp. 0,00 |

J. Sektor Bangunan/Konstruksi

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Jumlah bangunan yang ada tahun ini | 1 unit |
| Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan | Rp. 25.000.000,00 |
| Total nilai bangunan yang ada | Rp. 1.500.000.000,00 |
| Biaya antara lainnya | Rp. 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | |
| K.1. Subsektor Bank | |
| Jumlah transaksi perbankan | Rp. 400.000.000,00 |
| Jumlah nilai transaksi perbankan | Rp. 1.300.000.000,00 |
| Jumlah biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank | |
| Jumlah lembaga keuangan bukan bank | 0 Unit |
| Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank | 0 Jenis |
| Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| K.3. Subsektor Sewa Bangunan | |
| Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah | 0 unit |
| Total nilai persewaan yang dicapai | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| Biaya lainnya | Rp. 0,00 |
| K.4. Subsektor Jasa Perusahaan | |
| Jumlah perusahaan jasa | 0 Jenis |
| Nilai transaksi perusahaan jasa | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| Biaya lainnya | Rp. 0,00 |
| L. SEKTOR JASA-JASA | |
| L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum | |
| Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | 1 unit |
| Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat | Rp. 30.000.000,00 |
| Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan | Rp. 30.000.000,00 |
| L.2. Subsektor jasa swasta | |
| Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat | 0 jenis |
| Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial | Rp. 0,00 |
| Biaya yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi | |
| Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi | 0 jenis |
| Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi | Rp. 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan | Rp. 0,00 |
| L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga | |
| Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | 0 jenis |
| Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 0,00 |
| Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga | Rp 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
| M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI | |
| M.1. Subsektor Angkutan | |
| Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | 1 Jenis |
| Jumlah total kendaraan angkutan | 4 Unit |
| Nilai total transaksi pengangkutan | Rp 12.000.000,00 |
| Nilai total biaya yang dikeluarkan | Rp 13.000.000,00 |
| N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM | |
| N.1. Subsektor Listrik | |
| Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik | 0 Jenis |
| Jumlah nilai produksi listrik | Rp 0,00 |
| Jumlah total nilai transaksi | Rp 0,00 |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |
| N.2. Subsektor Gas | |
| Jumlah kegiatan penyediaan gas | 1 jenis |
| Nilai aset produksi gas | Rp 250.000.000,00 |
| Nilai transaksi | Rp 650.000.000,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 350.000.000,00 |

N.3. Subsektor Air Minum

| | |
|---|---------|
| Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum | 0 jenis |
| Nilai aset penyediaan air minum | Rp 0,00 |
| Nilai produksi air minum | Rp 0,00 |
| Nilai transaksi air minum | Rp 0,00 |
| Biaya antara yang dikeluarkan | Rp 0,00 |

IV. PENDAPATAN PERKAPITA**A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha****A.1. Pertanian**

| | |
|---|---------------|
| 1. Jumlah rumah tangga | 3571 Keluarga |
| 2. Jumlah total anggota rumah tangga | 10361 orang |
| 3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 825 Keluarga |
| 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 1024 orang |
| 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 65.000,00 |

B. PENDAPATAN RILL KELUARGA

| | |
|--|--------------|
| Jumlah Kepala Keluarga | 3554 KK |
| Jumlah Anggota Keluarga | 10261 orang |
| Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga | Rp 70.000,00 |
| Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja | Rp 50.000,00 |

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR**1. Sektor Pertanian**

| | |
|--------------------|------------|
| Petani | 1165 orang |
| Buruh Tani | 836 orang |
| Pemilik Usaha Tani | 35 orang |

2. Sektor Perkebunan

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Karyawan Perusahaan Perkebunan | 5 orang |
| Buruh perkebunan | 155 orang |
| Pemilik usaha Perkebunan | 4 orang |

3. Sektor Peternakan

| | |
|--------------------------|----------|
| Peternakan Perorangan | 10 orang |
| Buruh Usaha Peternakan | 35 orang |
| Pemilik Usaha Peternakan | 10 orang |

4. Sektor Perikanan

| | |
|-------------------------|---------|
| Nelayan | 0 orang |
| Buruh Usaha Perikanan | 0 orang |
| Pemilik Usaha Perikanan | 0 orang |

5. Sektor Kehutanan

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Pengumpul Hasil Hutan | 13 orang |
| Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan | 20 orang |
| Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan | 1 orang |

6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C

| | |
|-------------------------------|---------|
| Penambang Galian C Perorangan | 0 orang |
| Buruh Usaha Pertambangan | 0 orang |
| Pemilik Usaha Pertambangan | 0 orang |

7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga

| | |
|--------------|----------|
| Tukang batu | 32 orang |
| Tukang kayu | 15 orang |
| Tukang sumur | 3 orang |
| Pemulung | 2 orang |
| Tukang jahit | 9 orang |
| Tukang kue | 18 orang |
| Tukang rias | 10 orang |

8. Sektor Industri Menengah dan Besar

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Karyawan perusahaan swasta | 690 orang |
| Karyawan perusahaan pemerintah | 10 orang |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 9. Sektor Perdagangan | |
| Karyawan Perdagangan Hasil Bumi | 0 orang |
| Buruh Perdagangan Hasil Bumi | 298 orang |
| Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi | 90 orang |
| 10. Sektor Jasa | |
| Pegawai Negeri Sipil | 23 orang |
| Guru swasta | 27 orang |
| Wiraswasta lainnya | 307 orang |

VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

| | |
|--|-------------------|
| A. ASET TANAH | |
| Tidak memiliki tanah | 0 orang |
| Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha | 876 orang |
| Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha | 430 orang |
| Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha | 154 orang |
| Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha | 112 orang |
| Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha | 74 orang |
| Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha | 55 orang |
| Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha | 18 orang |
| Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha | 12 orang |
| Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha | 6 orang |
| Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | 3 orang |
| memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha | 2 orang |
| Memiliki tanah lebih dari 10 ha | 2 orang |
| Jumlah total penduduk | 1824 orang |
| B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM | |
| Memiliki ojek | 12 orang- 12 unit |
| Memiliki mini bus | 2 orang- 2 unit |
| C. ASET SARANA PRODUKSI | |
| Memiliki penggilingan padi | 2 orang |
| Memiliki traktor | 25 orang |
| Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian | 0 orang |
| Memiliki kapal penangkap ikan | 0 orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil perikanan | 0 orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil peternakan | 0 orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan | 0 orang |
| Memiliki alat pengolahan hasil hutan | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | 0 orang |
| Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas | 23 orang |
| D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING | |
| RUMAH MENURUT LANTAI | |
| RUMAH MENURUT ATAP | |

VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

| | |
|--|---------------|
| Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya | 3126 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya | 4580 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya | 190 Keluarga |

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

| | |
|--|------------|
| A. Tingkat Pendidikan Penduduk | |
| Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | 11 orang |
| Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 394 orang |
| Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | 6 orang |
| Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat | 1468 orang |
| Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat | 2958 orang |
| Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat | 2541 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat | 1427 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat | 1772 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat | 1004 orang |

| | |
|---|------------|
| Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat | 207 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat | 1509 orang |
| Jumlah penduduk sedang D-1 | 5 orang |
| Jumlah penduduk tamat D-1 | 16 orang |
| Jumlah penduduk sedang D-2 | 0 orang |
| Jumlah penduduk tamat D-2 | 16 orang |
| Jumlah penduduk sedang D-3 | 2 orang |
| Jumlah penduduk tamat D-3 | 15 orang |
| Jumlah penduduk sedang S-1 | 102 orang |
| Jumlah penduduk tamat S-1 | 84 orang |
| Jumlah penduduk sedang S-2 | 0 orang |
| Jumlah penduduk tamat S-2 | 6 orang |
| Jumlah penduduk tamat S-3 | 0 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLB A | 2 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLB A | 0 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLB B | 0 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLB B | 0 orang |
| Jumlah penduduk sedang SLB C | 0 orang |
| Jumlah penduduk tamat SLB C | 0 orang |
| Jumlah penduduk cacat fisik dan mental | 0 orang |
| B. Wajib belajar 9 tahun | |
| 1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | 1264 orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 1260 orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 4 orang |
| C. Rasio Guru dan Murid | |
| 1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak | 35 orang |
| 2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | 312 orang |
| 3. Jumlah guru SD dan sederajat | 45 orang |
| 4. Jumlah siswa SD dan sederajat | 2958 orang |
| 5. Jumlah guru SLTP dan sederajat | 5 orang |
| 6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat | 1772 orang |
| 7. Jumlah guru SLTA/sederajat | 3 orang |
| 8. Jumlah siswa SLTA/sederajat | 1509 orang |
| 9. Jumlah siswa SLB | 1 orang |
| 10. Jumlah guru SLB | 0 orang |
| D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat | |
| Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | 1 unit |
| Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | 0 unit |
| Jumlah perpustakaan keliling | 0 unit |
| Jumlah sanggar belajar | 0 unit |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | 0 kegiatan |
| Jumlah kelompok belajar Paket A | 0 kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket A | 0 orang |
| Jumlah kelompok belajar Paket B | 1 kelompok |
| Jumlah Peserta ujian Paket B | 12 orang |
| Jumlah kelompok belajar Paket C | 1 kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket C | 19 orang |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan | 0 unit |
| Jumlah peserta kursus keterampilan | 0 orang |

IX. KESEHATAN MASYARAKAT

| | |
|--|-----------|
| A. Kualitas Ibu Hamil | |
| Jumlah ibu hamil | 153 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | 152 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | 68 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | 25 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | 0 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | 20 orang |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih | 0 orang |
| Jumlah kematian ibu hamil | 0 orang |
| Jumlah ibu hamil melahirkan | 152 orang |
| Jumlah ibu nifas | 105 orang |
| Jumlah kematian ibu nifas | 0 orang |
| Jumlah ibu nifas hidup | 105 orang |
| B. Kualitas Bayi | |
| Jumlah keguguran kandungan | 3 orang |
| Jumlah bayi lahir | 107 orang |

| | |
|---|----------------|
| Jumlah bayi lahir mati | 2 orang |
| Jumlah bayi lahir hidup | 105 orang |
| Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | 0 orang |
| Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | 0 orang |
| Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 2 orang |
| Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang |
| C. Kualitas Persalinan | |
| Tempat Persalinan | |
| Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | 9 unit |
| Tempat persalinan Rumah Bersalin | 4 unit |
| Tempat persalinan Puskesmas | 1 unit |
| Tempat persalinan Polindes | 1 unit |
| Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | 6 unit |
| Tempat persalinan rumah praktek bidan | 2 unit |
| Tempat praktek dokter | 1 unit |
| Rumah dukun | 2 unit |
| Rumah sendiri | 0 unit |
| Pertolongan Persalinan | |
| Jumlah Persalinan ditolong Dokter | 75 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong bidan | 30 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong perawat | 2 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin | 2 tindakan |
| Jumlah persalinan ditolong keluarga | 0 tindakan |
| D. Cakupan Imunisasi | |
| Jumlah Bayi usia 2 bulan | 75 orang |
| Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | 75 orang |
| Jumlah bayi usia 3 bulan | 102 orang |
| Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 102 orang |
| Jumlah bayi usia 4 bulan | 98 orang |
| Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 98 orang |
| Jumlah bayi 9 bulan | 153 orang |
| Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 153 orang |
| Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 153 orang |
| E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | |
| Pasangan Usia Subur | |
| Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun | 460 orang |
| Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | 2.827 orang |
| Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | 2 orang |
| Jumlah pasangan usia subur | 1.245 pasangan |
| Keluarga Berencana | |
| Jumlah akseptor KB | 954 orang |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | 612 orang |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | 62 orang |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | 35 orang |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | 182 orang |
| Jumlah pengguna metode vasektomi | 0 orang |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | 68 orang |
| Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | 0 orang |
| Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | 0 orang |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx | 0 orang |
| Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 291 orang |
| F. Wabah Penyakit | |
| Muntaber | |
| Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 10 kejadian |
| Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
| Demam berdarah | |
| Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 13 kejadian |
| Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
| G. Angka Harapan Hidup | |
| Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan | 0,00 Tahun |
| Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota | 0,00 Tahun |
| Angka Harapan Hidup Provinsi | 0,00 Tahun |

| | | |
|--|------------------|-------------|
| Angka harapan Hidup Nasional | 60,00 Tahun | |
| | | |
| H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih | | |
| 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali | 20 Keluarga | |
| 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM | 45 Keluarga | |
| 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan | 0 Keluarga | |
| 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa | 0 Keluarga | |
| 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran | 3.576 Keluarga | |
| 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum | 0 Keluarga | |
| 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai | 0 Keluarga | |
| 8. Jumlah keluarga menggunakan embung | 0 Keluarga | |
| 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air | 15 Keluarga | |
| 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut | 0 Keluarga | |
| 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga | |
| Total jumlah keluarga | 3.651 Keluarga | |
| | | |
| I. Perilaku hidup bersih dan sehat | | |
| | | |
| Kebiasaan buang air besar | | |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 3.242 Keluarga | |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan | 312 Keluarga | |
| Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan | 5 Keluarga | |
| Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | 2 Keluarga | |
| | | |
| Pola makan | | |
| Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali | Tidak | |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | Ada | |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | Ada | |
| Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | Ada | |
| Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | Tidak | |
| | | |
| Kebiasaan berobat bila sakit | | |
| Dukun Terlatih | Sedikit | |
| Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu | Sedikit | |
| Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif | Tidak ada | |
| Paranormal | Sedikit | |
| Obat tradisional dari keluarga sendiri | Tidak ada | |
| Tidak diobati | Tidak ada | |
| | | |
| J. Status Gizi Balita | | |
| Jumlah Balita | 778 orang | |
| Jumlah Balita bergizi buruk | 0 orang | |
| Jumlah Balita bergizi baik | 854 orang | |
| Jumlah Balita bergizi kurang | 1 orang | |
| Jumlah Balita bergizi lebih | 1 orang | |
| | | |
| K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini | | |
| Jenis penyakit | Jumlah penderita | Di rawat di |
| Stroke | 4 orang | Rumah |
| Diabetes Melitus | 20 orang | Rumah |
| Asma | 1 orang | Puskesmas |
| | | |
| L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat | | |
| Jumlah MCK Umum | 2 unit | |
| Jumlah Posyandu | 7 unit | |
| Jumlah kader Posyandu aktif | 57 orang | |
| Jumlah pembina Posyandu | 2 orang | |
| Jumlah Dasawisma | 0 Dasawisma | |
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | 0 orang | |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif | 15 orang | |
| Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 10 orang | |
| Buku rencana kegiatan Posyandu | Diisi | |
| Buku data pengunjung Posyandu | Diisi | |
| Buku kegiatan pelayanan Posyandu | Diisi | |
| Buku administrasi Posyandu lainnya | 17 jenis | |
| Jumlah kegiatan Posyandu | 5 jenis | |
| Jumlah kader kesehatan lainnya | 0 orang | |
| Jumlah kegiatan pengobatan gratis | 3 jenis | |
| Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN | 1 jenis | |
| Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan | 1 jenis | |
| Lainnya | 1 jenis | |
| | | |

X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN**A. Konflik SARA**

| | |
|---|---------|
| Kasus konflik pada tahun ini | 2 kasus |
| Kasus konflik SARA pada tahun ini | 0 kasus |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga | 0 kasus |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW | 1 kasus |
| Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli | 0 kasus |
| Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | 0 kasus |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah | 0 kasus |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah | Rp 0,00 |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah | 0 orang |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan | 0 orang |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan | 0 orang |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah | 0 orang |
| Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | 0 kasus |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | 0 orang |
| Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik | Rp 0,00 |
| Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara | 0 buah |
| Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara | 0 rumah |
| Jumlah korban luka akibat konflik Sara | 0 orang |
| Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara | 0 orang |
| Jumlah janda akibat konflik Sara | 0 orang |
| Jumlah anak yatim akibat konflik Sara | 0 orang |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |

B. Perkelahian

| | |
|---|---------|
| Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini | 2 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa | 0 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah | 0 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material | 0 kasus |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |

C. Pencurian

| | |
|--|---------|
| Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini | 2 kasus |
| Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 2 kasus |
| Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 kasus |
| Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api | 0 kasus |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |

D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah

| | |
|---|---------|
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat | 1 kasus |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat | 0 kasus |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat | 0 kasus |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |

E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan

| | |
|--|---------|
| Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi | 2 orang |
| Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini | 1 orang |
| Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan | 1 orang |
| Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang | 5 orang |

F. Pemakaian Miras dan Narkoba

| | |
|---|---------|
| Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras | 0 buah |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras | 7 orang |
| Jumlah kasus mabuk akibat Miras | 0 kasus |
| Jumlah pengedar Narkoba | 0 orang |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba | 0 orang |
| Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba | 0 kasus |
| Jumlah kasus kematian akibat Narkoba | 0 kasus |
| Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |
| Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |

G. Prostitusi

| | |
|--|-----------|
| Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat | 0 orang |
| Lokalisasi prostitusi | Tidak Ada |
| Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) | 0 buah |
| Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi | 0 kasus |
| Jumlah pembinaan pelaku prostitusi | 0 kali |
| Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi | 0 kali |

| | |
|--|-----------|
| H. Pembunuhan | |
| Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini | 0 orang |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 kasus |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat | 0 kasus |
| Jumlah kasus bunuh diri | 0 kasus |
| Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum | 0 kasus |
| I. Penculikan | |
| Jumlah kasus penculikan | 0 kasus |
| Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 kasus |
| Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat | 0 kasus |
| Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum | 0 kasus |
| J. Kejahatan seksual | |
| Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini | 1 kasus |
| Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini | 1 kasus |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara | 0 kasus |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat | 0 kasus |
| Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks | 0 unit |
| K. Masalah Kesejahteraan Sosial | |
| Jumlah gelandangan | 1 orang |
| Jumlah pengemis jalanan | 0 orang |
| Jumlah anak jalanan dan terlantar | 1 orang |
| Jumlah manusia lanjut usia terlantar | 0 orang |
| Jumlah orang gila/stress/cacat mental | 3 orang |
| Jumlah orang cacat fisik | 9 orang |
| Jumlah orang kelainan kulit | 0 orang |
| Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan | 0 orang |
| Jumlah rumah dan kawasan kumuh | 0 unit |
| Jumlah panti jompo | 0 unit |
| Jumlah panti asuhan anak | 0 unit |
| Jumlah rumah singgah anak jalanan | 0 unit |
| Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota | 0 orang |
| Jumlah penghuni bantaran sungai | 0 orang |
| Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api | 0 orang |
| Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya | 0 orang |
| Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif | 0 orang |
| Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun | 12 orang |
| Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun | 40 orang |
| Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun | 5 orang |
| Jumlah janda | 423 orang |
| Jumlah duda | 337 orang |
| Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran | 0 orang |
| Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat | 1 orang |
| Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat | 6 orang |
| Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat | 84 orang |
| Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang | 10 orang |
| Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga | 298 orang |
| Jumlah penduduk eks NAPI | 3 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir | 0 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi | 0 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami | 0 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi | 0 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah | 0 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan | 0 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor | 0 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan | 0 orang |
| Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan | 0 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih | 0 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus | 0 orang |
| Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh | 0 orang |
| Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk | 0 orang |
| Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman | 7 orang |
| L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga | |
| Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri | 0 kasus |
| Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami | 0 kasus |
| Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak | 0 kasus |
| Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua | 0 kasus |
| Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya | 0 kasus |
| M. Teror dan Intimidasi | |

| | |
|---|---------|
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan | 0 kasus |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan | 0 kasus |
| Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk | 0 kasus |
| Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini | 0 kasus |
| Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat | 0 kasus |
| Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal | 0 kasus |

N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta

| | |
|--|------------|
| Organisasi Siskamling | Ada |
| Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat | Ada |
| Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda | 12 RT |
| Jumlah anggota Hansip dan Linmas | 70 orang |
| Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda | Ada |
| Buku anggota Hansip dan Linmas | 2 jenis |
| Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta | 2 unit |
| Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah | 2 kegiatan |
| Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan | 12 Pos |

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara

| | |
|---|------------|
| Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara | 0 jenis |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara | 0 kegiatan |
| Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika | 0 jenis |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika | 0 kegiatan |
| Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya | 0 jenis |
| Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya | 0 kegiatan |
| Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri | 0 kasus |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi | 0 orang |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi | 0 orang |
| Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan | 0 kasus |
| Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga | 0 kasus |
| Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini | 0 kasus |
| Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan | 0 kasus |
| Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini | 0 kasus |
| Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara | 0 kasus |
| Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini | 0 kasus |
| Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. | 0 kasus |
| Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya | 0 kasus |
| Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah | 0 kasus |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan | 0 kasus |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain | 0 kasus |

B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi

| | |
|--|-------------------|
| Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan | 2 jenis |
| Jumlah Wajib Pajak | 5169 orang |
| Target PBB | Rp 242.576.680,00 |
| Realisasi PBB | 85,00 % |
| Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB | 0 tindakan |
| Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan | 0 jenis |
| Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan | 0 orang |
| Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan | Rp 0,00 |
| Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan | 0,00 % |
| Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan | 0 jenis |
| Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan | Rp 0,00 |
| Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan | 0,00 % |
| Jumlah kasus pungutan liar | 0 kasus |
| Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar | 0 kasus |

C. Partisipasi Politik

| | |
|--|------------|
| 1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum | |
| Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih | 7541 orang |
| Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu | 6638 orang |
| Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik | 1 orang |
| Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini | 3 partai |

| | |
|--|--|
| Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini | 0 partai |
| Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan | 9 orang |
| Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu | 0 orang |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil | 6638 pemilih |
| 2. Pemilihan Kepala Daerah | |
| Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih | 7541 orang |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu | 6142 pemilih |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu | 6354 pemilih |
| 3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan | |
| Penentuan Jabatan Kepala Desa | Dipilih masyarakat secara langsung |
| Penentuan Sekretaris Desa | Diusulkan oleh Kepala Desa, Dipilih, Diangkat dan Ditetapkan oleh Bupati/Walikota |
| Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun | Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat |
| Masa jabatan Kepala Desa | 6 tahun |
| Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan | Ditunjuk dan diangkat oleh Camat sesuai Delegasi Kewenangan dari Bupati/Walikota |
| 4. Pemilihan BPD | |
| Jumlah anggota BPD | 9 orang |
| Penentuan anggota BPD | Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat |
| Pimpinan BPD | Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung |
| Pemilikan kantor/ruang kerja BPD | Ada |
| Anggaran untuk BPD | Ada |
| Produk keputusan BPD tahun ini | 1. Peraturan Desa 2 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 0 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 3 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 4 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 4 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 4 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 2 kali |
| 5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan | |
| Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan | Ada |
| Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD | Keputusan Kepala Desa |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan | 74 unit organisasi |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK | Keputusan Lurah |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan | 0 unit organisasi |
| Pemilihan pengurus LKD/LKK | Dipilih oleh rakyat secara langsung |
| Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya | Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/LKK |
| Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK | Aktif |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK | 5 kegiatan |
| Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK | Aktif |
| Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK | 5 kegiatan |
| Alokasi anggaran untuk LKD/LKK | Ada |
| Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya | Ada |
| Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK | Ada |
| Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD | Memadai |
| Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK | 8,00 % |
| Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK | Ada dan terisi |

| | |
|---|--------------|
| Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK | Berfungsi |
| C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN | |
| 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan | |
| Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan | 20 kali |
| Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan | 85,00 % |
| Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan | 60,00 % |
| Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan | 35,00 % |
| Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan | 64,00 % |
| Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif | Ya |
| Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan | Ya |
| Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif | Ya |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan | 9,00 % |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa | 5,00 % |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan | 5,00 % |
| Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel | 0 kegiatan |
| Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K) | Ada |
| Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K) | Ada |
| Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan | Ada |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi | 0 . kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang | 0 . kegiatan |
| 2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan | |
| Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang | 800,00 % |
| Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota | 854,00 % |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa | 12 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang | 10,00 % |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan | 6,00 % |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan | 13,00 % |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat | 5,00 % |
| Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada | Ada |
| Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. | Ada |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah | 0 kasus |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan | 0 kasus |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum | 0 kasus |
| Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan | 6 Jenis |
| Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan | 6 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi | 3 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN | 0 kegiatan |
| 3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk | |
| Jumlah kelompok arisan | 56 buah |
| Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh | 4 orang |
| Ada tidaknya dana sehat | Tidak |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah | Ada |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah | Tidak |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus | Tidak |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana | Ada |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha | Ada |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun | Tidak |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya | Tidak |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan | Ada |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian | Ada |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan | Ada |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi | Ada |

| | |
|---|---------------|
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya | Ada |
| 4. Adat Istiadat | |
| Adat istiadat dalam perkawinan | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam kelahiran anak | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam upacara kematian | Aktif |
| Adat istiadat dalam pengelolaan hutan | Tidak |
| Adat istiadat dalam tanah pertanian | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai | 9999 |
| Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar | Aktif |
| 5. Sikap Dan Mental Masyarakat | |
| Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan | 0 jenis |
| Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar | 0 jenis |
| Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah | 1 |
| Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah | 0 |
| Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal | 0 |
| Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga | 0 jenis |
| Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga | 0 jenis |
| Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga | 0 jenis |
| Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. | 0 kasus |
| Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya | 0 kasus |
| Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya | 0 kasus |
| Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya | 0 kasus |
| Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan | 0 |
| Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan | 1 |
| Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 0 |
| Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri | 0 |
| Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain | 0 |
| Etos Kerja Penduduk | |
| Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas | 1 |
| Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi | 0 |
| Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan | 0 |
| Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan | 0 |
| Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain | 0 |
| Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain | 0 |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota | 1 |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya | 0 |
| Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak | 1 |
| Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan | 0 |
| Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen | 0 |
| Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu | 0 |
| Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah | 0 |
| Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan | 1 |
| Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan | 1 |
| Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya | 0 |
| Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat | 1 |
| XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN | |
| A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN | |
| Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK | Tidak |
| Jumlah kegiatan | Jenis |
| B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN | |
| 1. Posyandu | Ada |
| Kepengurusan | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi | 7 |
| Jumlah kegiatan | 3 Jenis |
| 2. Rukun Tetangga (RT) | Ada |
| Kepengurusan | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi | 56 |
| Jumlah kegiatan | 2 Jenis |

| | |
|--|---------------|
| 3. Rukun Warga (RW) | Ada |
| Kepengurusan | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi | 14 |
| Jumlah kegiatan | 1 Jenis |
| 4. LKMD/LPM/Sebutan Lain | Ada |
| Kepengurusan | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi | 9 |
| Jumlah kegiatan | 6 Jenis |
| 5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Ada |
| Kepengurusan | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi | 12 |
| Jumlah kegiatan | 5 Jenis |
| 6. Karang Taruna | Ada |
| Kepengurusan | Ada dan Aktif |
| Buku Administrasi | 3 |
| Jumlah kegiatan | 3 Jenis |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa | |
| Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan | |
| Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan | |

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

| | |
|--|---------------------|
| A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan | |
| Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini | Rp 2.935.172.590,00 |
| Sumber Anggaran | |
| APBD Kabupaten/Kota | Rp 0,00 |
| Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp 0,00 |
| Bantuan Pemerintah Provinsi | Rp 0,00 |
| Bantuan Pemerintah Pusat | Rp 2.268.226.408,00 |
| Pendapatan Asli Desa | Rp 98.275.000,00 |
| Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp 0,00 |
| Alokasi Dana Desa | Rp 568.671.182,00 |
| Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan | Rp 0,00 |
| Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat | Rp 0,00 |
| Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan | Rp 663.897.241,00 |
| Jumlah Belanja Aparatur/pegawai | Rp 553.175.000,00 |
| B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah | |
| Penyampaian laporan keterangan pertanggungungan jawab Kepala Desa kepada BPD | 1 |
| Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat | 1 jenis |
| Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa | 1 |
| Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota | 1 |
| Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat | 2 jenis |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah | 0 kasus |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah | 0 kasus |
| C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
| 1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | |
| Gedung Kantor | Ada - Baik |
| Jumlah ruang kerja | 5 Ruang |
| Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya | Ada |
| Listrik | Ada |
| Air bersih | Ada |
| Telepon | Tidak Ada |
| 1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor | |
| Jumlah mesin tik | 0 buah |
| Jumlah meja | 12 buah |
| Jumlah kursi | 100 buah |
| Jumlah almari arsip | 7 buah |
| Komputer | 5 unit |
| Mesin fax | 0 unit |

| | |
|--|----------------|
| Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa | 2 unit |
| 1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | |
| Buku Data Peraturan Desa | Ada dan Terisi |
| Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah | Ada dan Terisi |
| Buku Administrasi Kependudukan | Ada dan Terisi |
| Buku Data Inventaris | Ada dan Terisi |
| Buku Data Aparat | Ada dan Terisi |
| Buku Data Tanah Kas Desa | Ada dan Terisi |
| Buku Administrasi Pajak dan Retribusi | Ada dan Terisi |
| Buku Data Tanah | Ada dan Terisi |
| Buku Laporan Pengaduan Masyarakat | Ada dan Terisi |
| Buku Agenda Ekspedisi | Ada dan Terisi |
| Buku Profil Desa dan Kelurahan | Ada dan Terisi |
| Buku Data Induk Penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku Data Mutasi Penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan | Ada dan Terisi |
| Buku Registrasi Pelayanan Penduduk | Ada dan Terisi |
| Buku Data Penduduk Sementara | Tidak Ada |
| Buku Anggaran Penerimaan | Ada dan Terisi |
| Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan | Ada dan Terisi |
| Buku Kas Umum | Ada dan Terisi |
| Buku Kas Pembantu Penerimaan | Ada dan Terisi |
| Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan | Ada dan Terisi |
| Buku Data Lembaga Kemasyarakatan | Ada dan Terisi |
| 2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD | |
| Gedung Kantor | 1 |
| Jumlah ruang kerja | 1 Ruang |
| Balai BPD | 1 - 1 |
| Listrik | 1 |
| Air bersih | 2 |
| Telepon | 0 |
| 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor | |
| Jumlah mesin tik | 0 buah |
| Jumlah meja | 1 buah |
| Jumlah kursi | 10 buah |
| Jumlah almari arsip | 1 buah |
| Komputer | 1 unit |
| Mesin fax | 0 unit |
| 2.B. Administrasi BPD | |
| Buku-buku administrasi kegiatan BPD | 1 |
| Buku Buku Administrasi Keanggotaan | 4 |
| Buku kegiatan BPD | 1 |
| Buku himpunan peraturan desa | 1 |
| Buku Lainnya | 0 |
| 3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN | |
| Gedung kantor atau Balai Pertemuan | |
| Alat tulis kantor | |
| Barang inventaris | Jenis |
| Buku administrasi | Jenis |
| Jenis kegiatan | Jenis |
| Jumlah pengurus | Orang |
| Jumlah ruang kerja | Ruang |
| D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | |
| 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan | |
| Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan | Ada |
| Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan | Ada |
| Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah | Ada |
| Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan serta BPD | Ada |
| Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing | Ada |
| Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 6 kegiatan |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | 5 kegiatan |
| Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan | 1 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, | 0 jenis |

| | |
|---|------------|
| peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN | |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan | 0 kali |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing | 0 kali |
| 2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan | |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan | 1 |
| Pedoman bantuan keuangan dari provinsi | 1 |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | 1 |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah | 1 |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi | 0 kegiatan |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing | 0 jenis |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan | 0 jenis |
| 3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan | |
| Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa | 0 jenis |
| Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa | 1 jenis |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa | 1 jenis |
| Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah. | 1 jenis |
| Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan | 1 jenis |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | 0 jenis |
| Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa | 1 jenis |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah | 1 jenis |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota | 5 jenis |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan | 2 jenis |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD | 10 jenis |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan | 0 jenis |
| Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan | 1 jenis |
| Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan | 0 jenis |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan | 0 jenis |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing | 0 kasus |
| Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah | 1 kasus |
| 4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan | |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | 3 kali |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan | 4 kali |
| Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan | 5 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa | 1 kali |
| Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan | 1 kali |
| Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan | 1 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan | 2 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 2 kali |
| Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan | 1 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan. | 3 kali |
| Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga | 2 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat | 4 kali |
| Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat | 0 kali |
| Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya | 0 kali |
| Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan. | 0 kali |

KAB. MALANG, 30 November 2022
TAWANGARGO
Kecamatan Karangploso
Kabupaten KAB. MALANG

H SUKAR
Kepala Desa

- Tembusan :
- 1. Camat Karangploso
 - 2. Bupati KAB. MALANG
 - 3. Arsip